

EVALUASI PERDA RTRW KABUPATEN SIDOARJO TERHADAP PENATAAN PEMBANGUNAN PENGGOLONGAN KAWASAN INDUSTRI

Wilda Nisa'ul Fitri, Sjamsiar Sjamsuddin, Hermawan

Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang
e-mail: niesa.rian@gmail.com

Abstract: *The Evaluation over Local Regulation About The Regional Space Order Plan of Sidoarjo District Against The Restructuring of Development of Industrial Region Grouping.* Target of reseatch is an evaluation over this local regulation is the regional space order plan. With implemented through qualitative research method with descriptive approach. And analysis technique is Miles and Huberman's interactive method. Industrial region at Sidoarjo District has been one contributor to local genuine income of Sidoarjo District. The development of this industrial region is in pursuance of Local Regulation about regional space order plan of Sidoarjo District. It can be concluded that in the context of the governments contribution to run the program the restructuring of development of industrial region grouping less than the maximum. Thus need for a specific evaluation of the various factors that influence and support to improve or fix the policy or program the restructuring of development of industrial region grouping.

Keywords: *Evaluation, Restructuring, Development, Regional Grouping, Industrial Region*

Abstrak: **Evaluasi Perda RTRW Kabupaten Sidoarjo terhadap Penataan Pembangunan Penggolongan Kawasan Industri.** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui evaluasi peraturan daerah rencana tata ruang wilayah. Dengan menggunakan jenis metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dan metode analisis yang digunakan adalah melalui metode interaktif Miles dan Huberman. Berkembangnya kawasan industri yang ada di Kabupaten Sidoarjo, yang merupakan salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo. Perkembangan kawasan indutri tersebut diatur dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sidoarjo. Dapat disimpulkan bahwa dalam konteks kontribusi pemerintah untuk menjalankan program penataan pengembangan penggolongan kawasan industri dalm tata ruang wilayah Kabupaten Sidoarjo kurang begitu maksimal. Maka dari itu perlu adanya sebuah evaluasi secara spesifik dari berbagai faktor yang mempengaruhi dan mendukung untuk memperbaiki atau membenahi kebijakan atau program penataan pembangunan penggolongan kawasan industri.

Kata kunci : **Evaluasi, Penataan, Pengembangan, Penggolongan Kawasan, Kawasan Industri**

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan, (Todaro, 2000).

Di Kabupaten Sidoarjo melalui Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menghendaki terciptanya ketertiban dalam kegiatan pembangunan dan pengembangan yang saat ini gencar dilaksanakan, khususnya dalam pengelolaan dan pengembangan zona industri, apalagi industri-

industri yang ada semakin berkembang dengan pesat mulai dari industri rumah tangga hingga industri yang berskala besar.

Salah satu pembangunan dan pengembangan yang dilakukan di Kabupaten Sidoarjo adalah penggolongan kawasan industri. Menurut Soedarso (2008), pada dasarnya pertumbuhan suatu wilayah atau kawasan industri akan dipengaruhi oleh mekanisme ekonomi dan pasar. Dengan sendirinya aliran kegiatan ekonomi dan investasi akan menuju lokasi yang menyediakan imbalan tertinggi atas produk dan jasa yang dikelolanya, baik berupa kemudahan-kemudahan berinvestasi, adanya sumber daya serta ketersediaan prasarana dan sarana, maupun besarnya nilai tambah atas barang dan jasa yang diproduksi. Proses ini

apabila berlangsung terus-menerus dapat menyebabkan suatu daerah yang memiliki peluang akan semakin berkembang, sebaliknya daerah yang kurang memiliki peluang akan semakin tertinggal. Di samping faktor mekanisme pasar, hal lainnya yang mempengaruhi persebaran kegiatan ekonomi adalah faktor alokasi ruang dan kebijakan pemerintah yang bersifat *exogenous*, seperti antara lain kebijakan dalam penentuan lokasi produksi, perizinan, ekspor-impor, perpajakan dan kewajiban pembangunan sektoral lainnya. Kesemua hal tersebut pada akhirnya akan berpengaruh dalam menentukan perkembangan suatu wilayah atau kawasan.

Kegiatan industri yang terpisah yang masih berada di luar kawasan industri dan teridentifikasi dan berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan akan direlokasi secara bertahap ke kawasan-kawasan yang direncanakan sebagai kawasan industri. Setiap perusahaan Industri di dalam kawasan industri wajib memenuhi semua ketentuan perizinan yang berlaku. Masih dalam pembahasan Narasi RTRW Kabupaten Sidoarjo, bahwa kegiatan industri kecil selama masih menyatu dengan permukiman dengan dominasi kegiatan permukiman, maka peruntukannya sebagai hunian. Dan juga kawasan industri kecil/industri rumah tangga diarahkan di permukiman sejauh tidak mengganggu fungsi lingkungan hunian tetap sebagai permukiman, sedang apabila berkembang maka harus dipindahkan ke dalam zona industri.

KAJIAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Menurut James E. Anderson dalam Wahab (2005), merumuskan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tersebut. Sedangkan menurut Thomas R. Dye dalam Suharto (2005), definisi kebijakan publik, yakni sebagai “*Whatever governments choose to do or not to do*” yaitu, pilihan tindakan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sementara itu Anderson dalam Islami (2007) mengartikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu. Friedrich dalam Nugroho (2008) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada.

Kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada didalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Oleh karena itu kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai suatu keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam rangkalah mengatasi permasalahan yang terjadi dalam masyarakat.

Evaluasi Kebijakan

Sebuah kebijakan publik tidak bisa *dilepas begitu saja*. Kebijakan harus *diawali*, dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut disebut “evaluasi kebijakan”. Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna mempertanggungjawabkan kepada konstituenya. Sejauh mana tujuan tercapai. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara “harapan” dan “kenyataan”.

Dunn dalam Nugroho (2008), mendefinisikan istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assesment*). Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik.

Tujuan pokok evaluasi bukanlah untuk *menyalah-nyalahkan*, melainkan untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara pencapaian dan harapan kebijakan publik. Tugas selanjutnya adalah bagaimana mengurangi atau menutup kesenjangan tersebut. Jadi, evaluasi kebijakan publik harus dipahami sebagai sesuatu yang bersifat positif. Evaluasi bertujuan mencari kekurangan dan menutup kekurangan.

Pembangunan

Pembangunan merupakan bentuk perubahan sosial yang terarah dan terencana melalui berbagai macam kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat Bangsa Indonesia, seperti termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah mencantumkan tujuan pembangunan nasionalnya. Menurut Suryono (2001), memberikan pendapatnya mengenai pembangunan, dimana pembangunan yang dilakukan negara-negara berkembang secara umum, merupakan suatu proses kegiatan yang direncanakan dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perubahan sosial dan modernisasi bangsa untuk

mencapai peningkatan kualitas hidup manusia dan kesejahteraan rakyat.

Menurut Todaro (2000), pembangunan harus memenuhi tiga komponen dasar yang dijadikan sebagai basis konseptual dan pedoman praktis dalam memahami pembangunan yang paling hakiki, yaitu kecukupan (*sustainance*) memenuhi kebutuhan pokok, meningkatkan rasa harga diri atau jati diri (*self-esteem*), serta kebebasan (*freedom*) untuk memilih.

METODOLOGI

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu penelitian yang berusaha mengungkapkan gejala secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri sebagai instrumen kunci. Dengan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif ini data yang dihasilkan adalah data berupa ucapan atau penulisan dan perilaku yang diamati dari orang-orang (objek) itu sendiri.

Fokus Penelitian

Peneliti mengambil fokus penelitian sebagai berikut:

1. Evaluasi Peraturan Daerah Tentang proses pelaksanaan program tata ruang terhadap zona-zona industri yang ada di Kabupaten Sidoarjo dalam penataan wilayah yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo, meliputi:
 - a. Proses pengelolaan penataan pembangunan industri.
 - b. Proses pengembangan pembangunan industri estate dan Mix Used.
 - c. Program penyiapan infrastruktur pendukung industri dan perdagangan.
 - d. Program pengembangan dan pembinaan Industri Kecil dan Usaha & Kecil Menengah.
2. Hambatan-hambatan yang ada dalam penataan tata ruang kawasan industri kecil dan Usaha Kecil & Menengah, kawasan zona industri, dan kawasan industri yang ada di Kabupaten Sidoarjo.
 - a. Faktor-faktor hambatan secara eksternal
 - b. Faktor-faktor hambatan secara internal

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo dalam Penataan Pembangunan Penggolongan Kawasan Industri.

Kebijakan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sidoarjo tentang penataan pembangunan penggolongan kawasan industri meliputi proses pengelolaan penataan pembangunan kawasan industri, penyiapan lahan industri estate dan mix use, penyiapan infrastruktur yang mendukung pembangunan kawasan industri, dan juga pengembangan dan pembinaan industri kecil dan usaha kecil & menengah. Kebijakan tersebut sudah pemerintah atur dalam Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Didalam Perda tersebut pemerintah ingin semua penataan pembangunan dalam tata ruang wilayah harus sesuai dengan apa yang telah ditetapkan pemerintah dalam perda nomor 6 tahun 2009. Dan evaluasi kebijakan yang dilakukan memuat beberapa hal yang Seperti apa yang diungkapkan oleh Nugroho (2008), di sisi lain lebih masuk ke sisi praktis dengan mengemukakan enam langkah dalam evaluasi kebijakan, yaitu:

1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi.
2. Analisis terhadap masalah.
3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan.
4. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi.
5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab lain.
6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

Dengan kata lain evaluasi sebuah kebijakn tersebut melihat beberapa aspek yang mempengaruhi dan mendukung sebuah kebijakan tersebut. Dan didalam kebijakan tersebut pemerintah ingin menciptakan sebuah kelarasan tata ruang wilayah yang ada di Kabupaten Sidoarjo, khususnya tata ruang wilayah untuk kawasan industri.

Setiap kebijakan yang dibentuk tentu akan ada evaluasi yang harus dilakukan agar dapat diketahui apakah kegiatan tersebut telah mencapai tujuan yang diinginkan atau sudah tepat pada sasaran yang diberikan. Hal ini seperti apa yang diungkapkan oleh Dunn dalam Nogroho (2008), yang mendefinisikan istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assesment*). Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya

mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik.

Di Kabupaten Sidoarjo terdiri dari beberapa golongan kawasan industri. Yaitu:

1. *Kawasan industri estate dan Mix Use*
2. *Zona industri*
3. *Kawasan industri kecil/industri rumah tangga*

Banyaknya lokasi industri yang ada di Kabupaten Sidoarjo tersebut, membuat penataan pembangunan tersebut harus dilakukan dengan betul-betul. Maka dari itu perlu adanya evaluasi secara ilmiah dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Begitu pula evaluasi penataan pembangunan penggolongan kawasan industri. Penataan pembangunan penggolongan kawasan industri merupakan sebuah program pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam hal penataan tata ruang wilayah mereka. Pembangunan ini meliputi berbagai hal yang mengenai penataan pembangunan kawasan industri yang telah ada. Evaluasi di sini digambarkan sesuai apa yang peneliti lihat dan amati di lapangan, beberapa evaluasi dari peneliti adalah sebagai berikut:

a. Proses pengelolaan penataan pembangunan industri

Pengelolaan penataan pembangunan industri dilakukan berdasarkan golongan kawasan industri yang ada. Pengelolaan ini dilakukan untuk mempermudah pemerintah dalam hal penataan tata ruang wilayah yang digunakan untuk kawasan industri tersebut.

Didalam proses pengelolaan penataan pembangunan industri harus ada sebuah pembangunan jalur hijau dan hal-hal mengenai sebuah pengelolaan. Upaya pengelolaan kawasan industri tersebut dilakukan dengan:

- a) Pengembangan kawasan industri dilakukan dengan mempertimbangkan aspek ekologis.
- b) Pengembangan kawasan industri harus didukung oleh adanya jalur hijau sebagai penyangga antar fungsi kawasan.
- c) Pembangunan Kawasan Industri dilakukan secara terpadu dengan lingkungan sekitarnya dengan memperhatikan radius/jarak dan tingkat pencemaran yang dapat ditimbulkan serta upaya-upaya pencegahan pencemaran terhadap kawasan di sekitarnya.

Hal tersebut harus dilakukan untuk menciptakan sebuah keserasian lingkungan. Pengelolaan ini adalah sebuah hal yang paling penting dalam sebuah penataan pembangunan kawasan industri. Proses yang paling utama dalam pengelolaan penataan pembangunan kawasan industri adalah proses dimana semua

aspek yang berhubungan dengan pembangunan kawasan industri dapat dilakukan dengan seimbang.

b. Program Penyiapan Lahan Untuk Industri Estate dan Mix Used

Program penyiapan lahan untuk kawasan industri estate ini sudah dilakukan sebuah pengembangan, yaitu kawasan industri estate yang ada di daerah Berbek. Industri estate Berbek sendiri sebenarnya adalah sebuah pengembangan dari Rungkut industri yang dikelola oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hal ini membuat pengembangan kawasan industri Berbek tersebut mudah dalam hal penataan dan pengembangannya. Sedangkan untuk kawasan industri estate Jabon atau JIP (Jabon Industrial Persada) yang akan dikembangkan seluas kurang lebih 2.600 Ha diarahkan menjadi kawasan industri berikat dilengkapi dengan bea cukai dan terminal kargo serta pemusatan aktivitas perdagangan dan jasa sehingga JIP menjadi sistem wilayah yang mandiri. Kegiatannya merupakan kegiatan industri berpolutan dilengkapi dengan fasilitas perdagangan, bank, perumahan karyawan, kawasan wisata dan olahraga yang dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo sulit untuk diadakannya sebuah pengembangan kawasan industri estate. Sebab banyak pengusaha yang tidak mau mengembangkan industrinya di daerah Jabon. Banyak kendala yang diterima oleh para pengusaha.

Seperti apa yang telah diungkapkan oleh Wahab (2001), evaluasi kebijakan merupakan program pembangunan, atau berbagai bentuk pemberian pelayanan kepada publik guna memperoleh informasi mengenai kinerja proyek atau program tersebut. Dapat dilihat dari data yang telah ada bahwa program penyiapan lahan yang berada di kawasan Jabon tidak berhasil dilaksanakan dengan baik. Banyak kendala yang diterima dari berbagai pihak yang bersangkutan.

Sedangkan penyiapan lahan untuk kawasan mix used dilakukan dengan baik oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta. Hal tersebut berjalan dengan baik sebab banyaknya keuntungan yang diterima oleh ketiga pihak tersebut. Kawasan mix used sendiri adalah sebuah kawasan yang sangat strategis bagi keberlangsungan sebuah industri. Sebab didalam kawasan mix used terdapat industri, kawasan permukiman, dan juga fasilitas lainnya yang mendukung industri. Dan kawasan Mix use mempunyai kelebihan:

1. Pergerakan produksi lebih dekat (tidak berjauhan).

2. Mengurangi kepadatan lalu lintas jalur transportasi barang (efisiensi transportasi).
3. Mengurangi beban biaya produksi (efisiensi ekonomi).
4. Memudahkan pengontrolan dan pengendalian dalam skala kawasan.
5. Efisiensi penyediaan infrastruktur. Penyiapan infrastruktur pun juga tidak perlu banyak dibangun.

Pada dasarnya penyiapan lahan yang dicanangkan oleh pemerintah ini baik dalam berbagai sektor yang menyangkut pengembangan sebuah kawasan industri. Akan tetapi, hal tersebut tidak sejalan dengan apa yang ada dilapangan. Hal ini dibuktikan dengan penyiapan lahan yang dicanangkan oleh pemerintah yang ada di kawasan Jabon, disana pemerintah sudah mempunyai plot lahan untuk kawasan industri estate, tetapi para pengusaha tidak ada yang tertarik untuk melakukan pembangunan. Para pengusaha lebih tertarik dengan melakukan pembangunan di dalam kawasan mix used yang padat. Sebab para pelaku industri sendiri mempunyai keuntungan sendiri dengan membangun dikawasan mix used yaitu lebih banyaknya pegawai yang bisa direkrut dan juga lebih murah biaya produksi mereka.

c. Program Penyiapan Infrastruktur Pendukung Industri dan Perdagangan

Penyiapan infrastruktur pendukung industri dan perdagangan ini adalah salah satu sarat utama dibangunnya sebuah kawasan industri. Infrastruktur pendukung tersebut meliputi, jalan raya, jaringan listrik, jaringan telepon, dan jaringan kereta api.

Seperti halnya apa yang telah diungkapkan oleh Suryono (2001), memberikan pendapatnya mengenai pembangunan, dimana pembangunan yang dilakukan negara-negara berkembang secara umum, merupakan suatu proses kegiatan yang direncanakan dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perubahan sosial dan modernisasi bangsa untuk mencapai peningkatan kualitas hidup manusia dan kesejahteraan rakyat.

Hal tersebut harus dipenuhi seutuhnya demi mendukung berjalannya sebuah industri dan perdagangan yang ada dikawasan industri. Infrastruktur yang lainnya yang juga harus disediakan adalah sebuah pembuangan limbah dan juga ruang terbuka hijau yang berada di dalam kawasan industri.

d. Pengembangan dan Pembinaan Industri Kecil dan Usaha Kecil & Menengah

Program ini juga ditujukan untuk pengentasan pengangguran yang ada di daerah. Kabupaten Sidoarjo terkenal akan banyaknya UKM dan Industri kecilnya, maka dari itu

pemerintah membuat program ini agar UKM dan Industri kecil yang sudah ada menjadi lebih berkembang.

Seperti apa yang telah diungkapkan oleh Supriyanto (2009), bahwa tata ruang sebagai suatu proses kegiatan dalam rangka menata atau menyusun bentuk strujtur dan pola pemanfaatan ruang secara efisiensi dan efektif. Dengan demikian dalam tata ruang terdapat suatu proses kegiatan yang terkandung didalamnya. Kegiatan tersebut adalah menata dan menyusun struktur dan pola pemanfaatan ruang. Adanya kegiatan yang sifatnya lebih efisien dan efektif, sehingga menghindarkan penggunaan ruang yang berlebihan.

Maka dari itu pemanfaatan ruang wilayah untuk industri kecil dan Usaha Kecil & Menengah harus benar-benar ditata dengan baik. Agar pengembangan dari hasil induttri kecil dan usaha kecil & menengah dapat mudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Sedangkan untuk pembinaan masyarakat terhadap potensi setiap daerah pun tidak luput untuk dilakukan demi terciptanya sebuah kesejahteraan bagi masyarakat. Akan tetapi didalam pembinaan ini terjadi sebuah ketidak-seimbangan. Ketidakseimbangan tersebut terjadi karena adanya beberapa daerah yang potensi masyarakatnya tidak di asa. Hal ini dapat dilihat dengan adanya pembinaan yang tidak merata yang dilakukan oleh pemerintah.

Dalam sebuah program pengembangan dan pembinaan pemerintah juga mempunyai rencana pengelolaannya juga. Rencana pengelolaan untuk kawasan ini adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan produk unggulan dengan bekerjasama dengan pihak akademisi dan ahli kerajinan (pelatihan, kursus).
2. Penyelenggaraan-penyelenggaraan bulan-bulan khusus untuk promosi hasil kerajinan.
3. Peningkatan kucuran modal lunak untuk para pengusaha sehingga bisa terus bekerja

Dengan adanya hal tersebut, menjadi sebuah kendala tersendiri bagi pemerintah maupun masyarakat itu sendiri.

Hambatan – Hambatan Proses Penataan Pembangunan Penggolongan Kawasan Industri

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat dalam proses penataan pembangunan sebuah kawasan industri meliputi beberapa hal. Antara lain meliputi faktor eksternal yang merupakan hambatan-hambatan yang diterima oleh pelaku industri maupun masyarakat dalm prosem penataan pembangunan kawasan industri. Sedangkan faktor internal merupakan hambatan-

hambatan yang diterima pemerintah dalam proses penataan pembangunan kawasan industri.

a. Faktor eksternal

Hambatan pertama yang dirasakan oleh pelaku industri setelah adanya Peraturan daerah ini adalah terlalu digolong-golongkannya lokasi pembangunan sebuah kawasan industri. Hambatan ini membuat para pelaku industri merasa sebuah hambatan yang besar dalam pengembangan industri mereka. Sebab, lokasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah kurang strategis untuk dibangunnya sebuah kawasan industri.

Dari pihak masyarakat juga merasa ada beban tersendiri dengan adanya kebijakan yang semakin kompleks. Dalam hal ini masyarakat merasakan banyaknya sebuah persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan peran terhadap proses pembangunan sebuah kawasan industri. Padahal peran masyarakat dalam sebuah keberhasilan penataan pembangunan kawasan industri sangat berpengaruh.

Antara pihak pelaku industri baru dan juga masyarakat merasa dibingungkan dengan pembangunan dan pengembangan industri mereka sendiri. Seperti halnya pengembangan Industri kecil dan UKM harus berada didalam kawasan sentra industri yang sebelumnya ada didalam kawasan perumahan masyarakat. Beban biaya dan lain halnya menjadi kendala bagi masyarakat yang ingin mengembangkan industri kecilnya. Maka dari itu banyak masyarakat yang berfikir ulang untuk melaporkan kepada pemerintah tentang pengembangan industrinya.

Sedangkan untuk pelaku industri besar yang baru mereka merasa kurang adanya sebuah kecocokan lokasi yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Hal ini menjadi kendala tersendiri dalam hal penataan pembangunan kawasan industri.

b. Faktor Internal

Hambatan-hambatan faktor internalnya yaitu hambatan yang diterima oleh pemerintah kabupaten Sidoarjo dalam proses penataan pembangunan golongan kawasan industri. Hambatan yang diterima oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo antara lain susahny mengkoordinasi para pelaku industri besar dalam penataan pembangunan industri mereka dan susahny menjalankan proses kebijakan yang terbaru yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tentang Tata Ruang Wilayah kawasan industri.

Pemerintah Kabuapten Sidoarjo merasa terpojokkan apabila penataan kawasan industri yang sudah ada sejak lama akan ditata. Banyak

resiko yang harus diterima apabila kawasan industri yang sudah ada tersebut ditata. Sering kali menerima ancaman yang cukup membuat pusing Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sendiri.

Padahal dalam sebuah ulasan yang diungkapkan oleh Dunn dalam Nogroho (2008), yang mendefinisikan istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assesment*). Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa evaluasi diatas merupakan penilaian yang terjadi pada program penataan pembangunan penggolongan kawasan industri di Kabupaten Sidoarjo.

Dapat disimpulkan bahwa dalam konteks kontribusi pemerintah untuk menjalankan program penataan pengembangan penggolongan kawasan industri dalam tata ruang wilayah Kabupaten Sidoarjo kurang begitu maksimal. Maka dari itu perlu adanya sebuah evaluasi secara spesifik dari berbagai faktor yang mempengaruhi dan mendukung untuk memperbaiki atau membenahi kebijakan atau program penataan pembangunan penggolongan kawasan industri. Sehingga bisa menjadi lebih baik pada tahap penataan dan pembinaan pada tahap – tahap berikutnya.

Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan penyajian data dan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Banyaknya Industri yang bermunculan di Kabupaten Sidoarjo merupakan sebuah bentuk dari pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh swasta maupun masyarakat Kabupaten Sidoarjo melalui pemanfaatan kawasan industri yang dimiliki Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk menjalankan penataan pembangunan penggolongan kawasan industri tersebut pemerintah membuat kebijakan-kebijakan dan upaya-upaya pengelolaannya.
3. Dalam menjalankan kebijakan tersebut pemerintah Kabupaten Sidoarjo menempuh berbagai cara. Salah satunya adalah pemberian status lokasi industri baru, memberikan kemudahan dalam perizinan industri kecil dan usaha kecil & menengah, memberikan pelatihan produk unggulan kepada masyarakat dengan bantuan ahli, pemberian jadwal pameran produk

unggulan Kabupaten Sidoarjo, dan juga pemberian tambahan modal demi terjadinya sebuah perkembangan dari industri kecil dan usaha kecil & menengah.

4. Faktor penghambat eksternalnya adalah kebijakan pemerintah yang lebih spesifik tentang industri menjadikan kesulitan tersendiri bagi para pelaku industri yang baru maupun yang telah ada. Sedangkan faktor penghambat internalnya adalah kurang maksimalnya pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, kurang maksimalnya pemerintah ini disebabkan oleh kurang adanya dukungan dari pihak swasta yang menjadi pelaku industri besar di Kabupaten Sidoarjo.

Saran

Terkait faktor-faktor penghambat yang muncul baik faktor internal maupun faktor eksternal dalam penataan pembangunan penggolongan kawasan industri seharusnya melakukan hal-hal berikut ini.

1. Menyelenggarakan pertemuan khusus antara pemerintah, pihak swasta yang merupakan para pelaku industri dan juga masyarakat yang mempunyai kepentingan dalam hal pengembangan penggolongan kawasan industri tersebut.
2. Memberikan ruang khusus untuk para pelaku industri dalam pengembangan industri mereka. Agar pemerintah bisa dimudahkan dalam penataan ruang wilayahnya.
3. Menyelenggarakan pemerataan pelatihan masyarakat di daerah yang mempunyai potensi produk unggulan.

Daftar Pustaka

- Islamy, M. Irfan. 2007. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nugroho, Riant. 2008. *Public policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo. Sidoarjo, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
- Soedarso, Bamabang Prabowo. 2008. *Penataan Ruang, Pemanfaatan, Akibat, dan Pertanggung jawaban Hukum Negara*. Jakarta : Cintya Press.
- Sugiono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik, Panduan Praktis mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyanto, Budi. 2009. *Manajemen Tata Ruang*. Tangerang: Media Berlian.
- Suryono, Agus. 2001. *Pengantar Teori Pembangunan*. Malang: Universitas Negeri Malang Pers.
- Todaro, Michael P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi VII*. Jakarta: Erlangga.
- Wahab, Solichin Abdul. 2005. *Analisis Kebijakanaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakanaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.